



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VI DPR RI  
DENGAN ASOSIASI PENJUALAN LANGSUNG INDONESIA (APLI)**

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke- : ...  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022  
Waktu : 14.00 WIB s.d. 17.58 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Ketua Rapat : Wakil Ketua Komisi VI F-P. GOLKAR/ (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P)  
Acara : Menerima Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung/Dijual secara berjenjang/*Member get Member*  
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI

Hadir

**A. Anggota DPRRI:**

24 dari 54 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)**

6 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Darmadi Durianto
3. ST. Ananta Wahana, S.H.
4. I Nyoman Parta, S.H.
5. dr. H. Mufti A. N. Anam.
6. DR. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

5 dari 8 orang Anggota



1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
  2. Ir. H. Moh. Idris Laena
  3. Doni Akbar, S.E
  4. Nusron Wahid
  5. Ir. Moh. Ichsan Firdaus
3. **FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**  
3 dari 7 orang Anggota
1. Mohamad Hekal, M.B.A
  2. Ir. H. La Tinro LaTunrung
  3. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M., MBA
4. **FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)**  
4 dari 6 orang Anggota
1. Martin Manurung, S.E., M.A
  2. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
  3. Muhammad Rapsel Ali
  4. H. Subardi, S.H., M.H
5. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**  
dari 5 orang Anggota
6. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**  
3 dari 5 orang Anggota
1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
  2. Hj. Melani Leimena Suharli
  3. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
7. **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**  
1 dari 4 orang Anggota
1. Hj. Nevi Zuairina
8. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**  
2 dari 5 orang Anggota
1. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
  2. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM
9. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**  
dari 2 orang Anggota



**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.) :**

Shalom Om Swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI, selamat datang kami ucapkan,

Kepada yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI, APLI atau A P L I biasa disebutnya Pak?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

APLI.

**KETUA RAPAT:**

APLI. Bapak Kany V. Soemantoro, kelihatannya Pak Ketua Umum nggak datang ya, mungkin Nanti Ibu saja yang perkenalkan siapa yang hadir pada hari ini, tentu beserta jajarannya semua.

Puja puji syukur terhadap kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Penjualan, Pengurus Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia APLI, pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Dalam penyebaran Covid-19 maka rapat-rapat dilakukan oleh alat kelengkapan dewan dan mitra kerja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah melemah sedikit, itu tadinya dari 20 yang boleh hadir hanya 20%, selebihnya adalah *zoom*, sekarang boleh hadir 80%.

Jadi kelihatannya pandemi ini sudah mulai berakhir di Indonesia, sehingga karantina dan apa diperlonggar, baik itu persyaratan PCR maupun antigen, kemudian juga saya melihat perkembangannya dari kaca mata saya kebetulan saya orang Bali, kemarin dibuka di Bali terus ada karnaval juga waktu sebelum Nyepi sehari sebelum nyepi begitu ramainya disetiap desa, begitu ramainya sampai ke kota-kota karnaval, ternyata seminggu setelah itu, 2 minggu setelah itu juga dicek tidak ada kenaikan yang signifikan, sehingga menggembirakan untuk negeri kita, yang memang sudah hampir 2 tahun puasa.

Jadi soal dari pada ketentuan untuk bisa mengikuti rapat-rapat disini, sudah dipermudah sekarang ini, namun masih tetap ada yang *zoom*, karena saya berharap 20% nya adalah *zoom*, yang lainnya ya sesuai ketentuan dari pada rapat-rapat yang sebelumnya.





Kemudian hal yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa rapat ini tercatat dan direkam ya, direkam di yang termasuk yang input di *zoom* juga dianggap adalah absen, jadi.

**Bapak Ibu yang hadirin yang kami muliakan,**

Terima kasih, kami ucapkan kepada Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia (APLI) beserta jajaran atas kesediaan waktunya untuk mengadiri RDPU pada hari ini, sesuai undangan yang telah kami sampaikan agenda hari ini adalah untuk menerima pengaduan terkait maraknya kasus penipuan investasi, yang berkedok robot *trading* melalui distribusi penjualan langsung, dijual secara berjenjang, *member get member*, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Saudari Sekjen ya, untuk siapa yang akan presentasi Ibu Sekjen ya, untuk mempersentasikan menyampaikan aspirasinya, kami persilahkan, namun sebelum itu tolong diperkenalkan ya, terima kasih.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

*Bismillahirrohmanirrohim*  
*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Selamat siang.

Saya selaku Sekjen dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, nama saya Ina H. Rahman, disebelah saya ada Ketua Bidang Divisi Hukum dan Perundang-undangan APLI, kemudian Pak Doktor Uus Mulyaharja, SH., MH., CLA, disebelah beliau ada Dewan Pembina APLI Bapak Roys Tanani, kemudian ada Bapak Erwin Indriarto, ada Bapak Andreas, Pak Michael, dan rekan-rekan pengurus APLI, semua yang hadir adalah kepala bidang di asosiasi kami.

Sedikit tentang APLI, APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, mungkin orang lebih mengenal asosiasi MLM di Indonesia. Kebetulan kami sudah 37 tahun, dan kami berafiasi dengan WFDSA organisasi MLM dunia atau *World Federation Direct Selling Association* yang berkantor pusat di Washington DC. Anggota kami kebetulan saat ini sudah 108 perusahaan diantaranya Tupperware, Herbalife, Nu Skin, Oriflame, Jafra, K-Link dan lain-lain. Itu sedikit singkat tentang asosiasi kami. Memang selama ini kami asosiasi yang sangat tertib, artinya tertib dengan aturan, karena kami berkiblat di Kementerian Perdagangan, khususnya di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Nah mengapa kami sampai akhirnya mengadu ke Bapak Ibu di Komisi VI ini, karena memang kami melihat fenomena yang sudah sangat merusak citra industri kami disini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasusnya *robot trading*, atau *forex* yang biasa kita dengar, bahkan banyak sekali korbannya itu sudah sampai jutaan orang, dan nominalnya itu per satu perusahaan yang mengatas namakan menjual melakukan *trading* itu kurang lebih *membernya* itu sampai 500 sampai 1 juta orang, kerugian itu perusahaan kurang lebih bisa ditaksir minimal 500 miliar minimal, untuk satu perusahaan yang mengklaim dirinya melakukan *trading* di Indonesia, itu satu. Nah saat ini yang melakukan





hal itu, kami sudah sudah audiensi dengan teman-teman di Bareskrim, yang sudah masuk kasusnya, sudah ada beberapa pelaku *trading* yang dianggap melakukan skema piramida dan penipuan.

Nah kenapa kami harus mengadu disini, pertama ini merupakan dilematis buat kami Bapak Ibu, mengapa kami katakan dilematis, awalnya ini perusahaan apa industri kami dilirik oleh para pelaku, karena menggunakan sistem *network marketing*. *Network marketing* itu *member get member*, contohnya begini kalau misalnya mereka melakukan trading secara konvensional, butuh waktu untuk mendapatkan komisi atau bonus secara kalau, kalau secara konvensional ya, mereka akan mendapatkan komisi bonus misalnya target satu miliar mereka ketika menggunakan jalur konvensional mereka mungkin membutuhkan waktu 3 bulan atau 4 bulan, tapi kalau menggunakan industri kami menggunakan *network marketing* mereka bisa mendapatkan satu miliar hanya dalam hitungan hari, bisa tiga, bisa satu minggu. Jadi memang industri kami ini sangat, sangat, sangat dirugikan dengan adanya fenomena ini.

Kemudian yang kedua, serba salahnya adalah kami selama ini berkiblat direkan-rekan perdagangan dalam negeri di bidang usaha, di bawah Kementerian Perdagangan, akan tetapi saat ini sudah mulai melibatkan Bappebti dan teman-teman di PKTN, PKTN ini tertib niaga, kalau bahasa di kami itu polisinya teman-teman diperdagangan dalam negeri, contohnya begini, kami dari APLI perusahaan anggota APLI inikan banyak, kita ambil contoh misalnya perusahaan XX, kalau kami mau menjual produk kami harus punya izin namanya SIUPL atau MLM *license*. Nah dalam MLM *license* itu SIUPL kita harus punya lampiran produk yang bisa kami jual, nah kalau lampiran produk itu kami menjual produk tapi produk yang kami jual tidak ada dilampiran itu maka kami tidak boleh melakukan penjualan produk.

Nah fenomena yang sekarang adalah kami diizinkan menjual robot, perusahaan anggota kami diijinkan menjual robot, izinnya juga dikeluarkan oleh teman-teman perdagangan, jadi *list* produk itu ada di *list* SIUPL lampiran di ijin kami, *list* penjualan produk kami itu, nah kemudian setelah ada apa robot-robot itu laku dijual, kemudian dilakukanlah *trading*, karena adanya robot itu. Nah ketika robot ini sudah sudah dibeli, sudah selesai tugas perusahaan anggota kami, katakanlah anggota kami dan tidak anggota kami, kemudian mereka melakukan *trading*, mengatasnamakan *trading* dengan menggunakan robot yang dijual, yang sudah mendapatkan izin. Nah ternyata juga itu *trading* itu dilakukan secara *member get member* mengatasnamakan MLM, mengatasnamakan *direct selling*, sehingga muncullah korban-korban yang luar biasa banyak. Nah yang menjadi garis bawah dari pertemuan kali ini adalah bagaimana nasib *member-member* kami yang sudah terjebak, bagaimana nasib *member-member* kami yang sudah apa yang eksisting menjalankan jaringannya ini.

**KETUA RAPAT:**

*Sorry sorry* diulang dikit ini. Jadi robot itu yang didaftarkan gitu Bu gimana?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**



Nggak jadi begini, misalnya begini, misalnya katakan saya perusahaan xxx gitu ya, nah kita boleh nggak sih menyebut asosiasi satu lagi, supaya lebih *clear* gitu ya, artinya begini asosiasi kami ada satu lagi, tapi bukan, bukan kami, ada satu lagi namanya asosiasi AP2LI. Nah asosiasi ini, ini menjual apa anggotanya ini perusahaan-perusahaan yang menjual robot, pelan-pelan ya saya *iniin* ya biar paham, nah ini saya pelan-pelan.

**KETUA RAPAT:**

Asosiasi ini menjual.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Anggotanya, kalau kami ini APLI, kami kan anggotanya Tupperware, K-Link, Herbalife, Nu Skin, Amway ya.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya, jadi produk?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Produk, kami jual produk nih, asosiasi yang satunya.

**KETUA RAPAT:**

Ini sistem?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Hah, sistem?

**KETUA RAPAT:**

Kalau yang satu lagi sistem dong, karena robot itu sistem.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

iya dia lebih banyak menjual ke sistem, kalau bahasa kita robot itu *software analyzer*.

**KETUA RAPAT:**

*Software analyzer.*



**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

*Software analyzer.*

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Jadi kita nggak perlu *trading*, jadi *trader*, kita cukup *ngandelin* robot aja yang kerja by algoritma.

**KETUA RAPAT:**

*Software.*

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

*Software analyzer.*

**KETUA RAPAT:**

*Analyzer.*

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

SA kita menyebutnya.

**KETUA RAPAT:**

Saya lebih tertarik dengan itu bahasa itu *software analyzer*.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Ya, *software analyzer*.

**KETUA RAPAT:**

Baru agak-agak ini, agak

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Iya iya. Nah di sebelah itu anggotanya rata-rata menjual itu gitu ya, sehingga mereka itu, masyarakat itu jadi, karena mirip namanya APLI dan AP2LI ya, nah sebenarnya kita nggak mau nyebut *brand*, tapi memang harus ini biar, biar kita jelas





semuanya. Nah asosiasi itu memang anggotanya *almost* 90% mereka melakukan penjualan itu gitu ya, dan saya juga tidak bisa menyalahkan karena, mereka berargumentasi mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan, dan itu memang benar dapat izin Pak, robot-robot itu dapat ijin gitu, nah akan tetapi seiring waktu berjalan ya, *trading* yang dilakukan oleh robot-robot itu, yang menggunakan robot-robot itu ternyata *hoax*, alias tidak *trading* sebenarnya, sebenarnya jadi robotnya kamufase Pak, jadi itu cuma kayak orang penggalangan dana masyarakat aja.

**KETUA RAPAT:**

Oh.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Gitu.

**KETUA RAPAT:**

Tapi di *mindset* orang, itu robot tadi itu analisis kan?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Apa namanya.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Seakan-akan. Makanya akhirnya teman-teman Bareskrim.

**KETUA RAPAT:**

Itu ada yang SMI itu namanya kalau nggak tuh.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Ok-ok terus.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Ya jadi itu baru satu Pak, ada beberapa lagi begitu kan.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Nah cuma yang disini adalah yang yang industri kami bingung adalah, mereka dapat izin, sehingga akhirnya kami uji coba juga gitu kan coba-coba mungkin kalau asosiasi kita ngajuin dapat ijin juga nggak ya, ternyata dapat juga Pak, kita dapat juga nih xx ya kita dapat juga, kita *trading* juga. Nah masalahnya adalah ketika mereka melakukan perekrutan itu, mereka menggunakan *network marketing*, *network marketing* industri kami yang sudah sangat besar, sehingga sekarang akhirnya jaringan udah rusak, udah nggak karu-karuan, yang dulunya dengan adanya si *trading* ini, ini sangat menguntungkan, karena pandemi kan orang nggak bisa keluar, mereka cukup *join* di *trading* xx misalnya uang 10 juta, kemudian sebulan mereka sampai 10% sampai 15% dan mereka masyarakat banyak yang *happy* dengan dengan dengan *trading* tersebut gitu kan. Seiring waktu berjalan ternyata mulai ada penangkapan, ternyata mulai ada pengakuan-pengakuan bahwa semuanya adalah fiktif, bahwa semuanya sebenarnya hanya perputaran atau permainan uang biasa.

Nah kami itu bingung gitu, jadi jadi jaringan yang eksisting saat ini yang sudah ada, itu nasibnya mau bagaimana, kemudian uang uang uang member kami, yang katakanlah mereka dari berjualan Tupperware, mereka dari berjualan apa Herbalife dapat uang, dapat bonus, bonusnya malah dipakai buat *trading*, itukan luar biasa apa ya pasti mereka sangat-sangat terpuruk dengan situasi ini.

**KETUA RAPAT:**

Terus, *sorry* Bu, tapi yang kemarin yang dibekukan itu yang mana aja Bu? Kan ada beberapa yang dibekukan itu kalau saya.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Banyak, ada Viral Blast, Viral Blast, Viral Blast, DNA PRO, Fahrenheit malah mereka tuh macam-macam bukan dibekukan ini Pak, jadi kayak Fahrenheit, mereka tiba-tiba lakukan MC, *margin call*. Jadi seakan-akan semua kalah *trading*nya, jadi mereka memutuskan sepihak gitu, terus ada lagi Viral Blast, ini yang Viral Blast lebih parah, karena ketua asosiasi sebelah terlibat disini gitu kan, saya enggak tahu statusnya sampai sekarang, itu videonya sampai terekam, bahkan ketua kami jadi kena sasaran gitu, jadi

kayaknya ketua umum kami juga jadi agak-agak trauma, karena terkait namanya miripkan, wah ini ketua terlibat, padahal bukan ketua kami yang terlibat gitu. Jadi memang banyak memberi apa sih.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Bu, yang Fahrenheit itu sampai 5 triliun gitu, gimana tuh ceritanya?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Nah itu Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Itu 5 triliun loh Ketua.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

5 triliun untuk Fahrenheit aja, makanya luar biasa, nah kalau kita sih lebih berfikir ini yang udah jadi jaringannya, ini kan jaringan kami sebenarnya, jaringan-jaringan *real* MLM gitu, sama mereka diacak-acak jadi jaringan robot begitu kan.

Nah maksud kami apakah apa sih tidak kebijakan dari Pemerintah, karena sudah terlanjur terbentuknya jaringan, apakah sebaiknya dibentuk peraturan tersendiri terkait masalah ini. Karena jujur kami dari *direct selling*, kami tidak boleh melakukan *trading* apa bisnis komoditi berjangka, karena terhalang oleh PP 29 Pasal 50 Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Bu sebentar, pasarnya trading kayak gitu tuh berapa sebenarnya, *captive marketnya* itu?

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

*Captive market.*

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Ya makanya perkiraan aja Ketua.

**SEKJEN APLI (INA H. RACHMAN):**

Silahkan Pak Roy.





**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Ijin Bapak Pimpinan.

Jadi mungkin saya cerita dulu awalnya supaya jelas ya, supaya kita ini gampang dipahami. Jadi inti dari apa yang disampaikan Bu Sekjen adalah kita dalam 37, 35 tahun dari awal dari 80-an, kami menjaga sekali agar tidak terjadi namanya *money game* atau skema ponzi, atay umumnya dipanggilnya *money game* ya, tapi di kalau kita tahunya skema ponzi dan skema piramida. Nah *problemnya* adalah apa yang disampaikan oleh Bu Sekjen adalah sejak pemerintah dulu BKPM ada peraturan yang mengakui hanya 1 asosiasi, jadi selama 35 tahun kita jaga negara ini dari terjadinya *money game*, skema ponzi. Jadi kami sangat ketat sekali memeriksa setiap, jadi dulu BKPM mengundang kita untuk setiap pengajuan setiap pengajuan, setiap pengajuan izin itu harus ada asosiasi APLI, tapi akhir-akhir ini terjadi perubahan, karena entah gimana peraturan itu dicabut, jadi ada dua asosiasi ada 2 asosiasi. Nah dengan adanya 2 asosiasi ini mulai terjadi kompetisi.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Yang mencabut siapa tuh Pak?

**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Yah?

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Yang mencabut?

**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Saya kurang tahu, tapi dari Kementerian Perdagangan waktu itu dipindahkan dari BKPM ke Kementerian Perdagangan ya Bu ya. Nah sejak dipindahkan itu peraturan, kami tidak bisa menjaga lagi Pak, jadi apa yang terjadi adalah setiap yang kami tolak itu lari ke sebelah, lari ke sebelah, lari ke asosiasi sebelah, dan disana tentu saja yang belum ada izin aja boleh punya, boleh jadi anggota.

Nah disana *problemnya* mulai. Jadi skema ponzi, skema piramida ini tidak akan hilang Pak, kita ingat Bernie Murdoch yang paling terkenal di Amerika tuh kan penjara seumur hidup. Nah di Indonesia kita ambil kasus *Dream for Freedom* ingat nggak DF Four, DF4 itu luar biasa ya triliunan juga, nah itu itu terjadi memang selama kita 35 tahun kita jaga ada kecil-kecil yang terjadi di daerah, tapi sempat kita kita laporkan, kita kerjasama, tapi sejauh ini nggak biasa. Nah *Dream for Freedom* itu penjaranya cuma 3 tahun Pak, saya boleh sebut nama nggak ya, nggak bisa ya?

**KETUA RAPAT:**

Sudah pernah di media massa enggak Pak? Sudah pernah ada di media massa enggak apa-apa.

**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Sudah di media massa, jadi waktu itu namanya Fili Muttaqien cuma dipenjara 3 tahun, kita bandingkan dengan Bernie Murdoch yang menipu melakukan penipuan, untuk penjaranya 126 tahun. Jadi skema ponzi, skema piramida ini sangat berbahaya Pak. Albania itu pernah melakukan skema ponzi piramida masif, termasuk militernya, akhirnya apa negaranya bangkrut Pak, itu masif, terjadi pemberontakan 2.000 meninggal dan sebagainya dan segalanya.

Jadi kami dari awal saya, saya dan dengan Bu Indah, teman-teman, semua Sekjen dan teman-teman pengurus kita sangat *concern* ini, kita memang di industri ini yang banyak MLM ini menarik Pak. Karena disini ibu-ibu yang tidak punya pendidikan atau bapak-bapak tidak punya pendidikan, bukan persoalan pendidikan ya, mungkin mereka tidak punya tempat lapangan kerja, mereka bisa menjual produk, mereka tidak terserap oleh lapangan kerja resmi bisa diserap oleh kita.

Nah *problemnya* sekarang adalah ada, ada serigala yang berbulu domba yang masuk dengan perizinan lengkap, ini membuat masyarakat tambah bingung Pak, karena perizinannya lengkap semua, nah begitu perizinan lengkap semua ditawarkan ternyata skema ponzi piramida, kalau dulu kan ketahuan, nggak ada izinnya, sekarang nah ini yang dimaksud Ibu Ina dengan, Bu Sekjen dengan adanya kompetitor perusahaan akhirnya maka asosiasi izin ini bisa keluar, dan izin ini begitu keluar kasuslah semua, dan ini masif Pak, mungkin perkiraan perkiraan sekarang itu bisa sampai 20 sampai 50 triliun Pak, sedangkan omset daripada MLM setahun 10 triliun, kita 11 ya, paling 11 triliun. Tapi mereka *money game* sangat cepat sekali skema ponzi piramida itu mencapai 50 triliun hanya dalam berapa bulan Pak, jadi kenapa mulai.

**KETUA RAPAT:**

Saya, saya malah mentengarainya lebih itu.

**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Iya bener Pak, ada yang.

**KETUA RAPAT:**

Karena dibilang robot saya makanya denger teman cerita robot ini, robot itu dan menarik ini katanya, robot waduh.





**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Bahkan yang.

**KETUA RAPAT:**

Enak bener cari duit itu.

**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Iya Pak. Bahkan yang saya prihantin saya pernah denger di Bali ada 1 kabupaten yang kelurahan atau kecamatannya uang dana, dana pemerintahnya dipakai buat kesana, dengan harapan berkembang gitu loh, tapi kan *scam* sekarang, jadi semua panik gitu loh Pak, jadi ya, ya ini yang menjadi *concern* kita, kita hari ini *unek-unek* menyampaikan bahwa ya bahayanya skema ponzi dan piramida ini akan, kalau tidak dihentikan segera Pak, tidak dibikin peraturan lebih keras, ini bisa merusak negara Pak, Bapak Ibu, terima kasih, mungkin saya kembalikan ke yak.

**KETUA RAPAT:**

Kalau masif negara bisa runtuh ini. Silahkan.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Izin menambahkan Pimpinan dan yang hadir disini.

Jadi prinsipnya memang dunia atau bisnis industri *Multi Level Marketing* ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2014, di Pasal 7 itu dibagi, bahwa, ada yang namanya penjualan langsung ada yang namanya penjualan tidak langsung. Nah penjualan langsung itu yang disebut *direct selling*, *direct selling* dibagi menjadi *Multi Level Marketing* dan *single level*. Nah karena dia menggunakan jaringan mitra usaha ini sering disalahgunakan, makanya sejak tahun 80-an sudah ada yang namanya koperasi, bisnis jati, dan segala macam yang berkedok MLM, tapi dia menjalankan Skema Piramid. Skema Piramid kalau kita baca di Undang-Undang 7 adalah bahwa perolehan bonus dan komisi bukan dari penjualan barang, tapi diperoleh dari *recruiting*, jadi walaupun ada barang itu hanya kamufase, misalkan ada barang misalkan bentuknya misalkan kayak batu dikasih warna dan segala macam sehingga diakui memiliki energi, itu bisa dihargai yang cukup mahal, sehingga itu menjadi objek jual belinya, padahal itu hanya kamufase, barangnya itu tidak setara.

Nah terus kemudian dalam perjalanannya itu banyak juga, misalkan dia mencoba untuk merekrut orang dengan cara model-model yang sekarang ini, dengan era yang sudah mulai berjalan ya, mulai maju dengan era digital Pak, sekarang ini sudah mulai kepada digitalisasi dalam hal skema piramid, oleh karenanya kita sangat prihatin dengan keadaan sekarang, tadi Pak Roy sudah bicara bahwa akibat daripada skema ponzi ini itu



satu negara dalam Albania *rebellion* itu bisa sampai hancur, karena perang saudara, karena krisis orang-orang pada ikut skema piramid ya, terus kemudian.

**KETUA RAPAT:**

Piramid ya?

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Iya digital piramid, jadi sudah mulai bertransformasi dengan kondisi yang sudah serba digital. Kalau saya melihat disini kami berharap dari kami ini agar ini diatur dalam aturan, misalkan terkait dengan robot, kalau kita bicarakan keberadaan robot itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perdagangan dan PP 29 itu termasuk barang Pak, makanya harus *clear*, karena yang disebut dengan barang adalah benda baik yang berwujud dan tidak berwujud dihabiskan, ini merujuk pada ketentuan buku 2, apa tentang kebendaan, *second recht*. Jadi sebetulnya itu *clear*, cuma *problem* nya si robot ini sebetulnya sebagai satu alat, alat untuk *trading*, bahkan di dunia pasar modal sudah ada yang namanya Algo Trading, cuma memang dia lebih spesial apa lebih khusus ya, hanya tertentu orang yang bisa Algo Trading, misalkan dia punya kepemilikan dana yang cukup banyak dan segala. Nah sekarang sudah berkembang dengan robot trading, robot trading ini adalah dalam bentuk *software* sebagai alat, kalau kita bicara *intellectual property rights* dia juga masuk kebendaan, sehingga tidak aneh tadi kata Bu Ina, pada saat mengajukan permohonan si barang itu disebut benda, sehingga menjadi objek jual beli, bisa diperdagangkan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga oleh perdagangan diterbitkan lah izin, nah.

**KETUA RAPAT:**

Tapi itukan sistem bukan benda robot itu.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Disebut itu sebagai *right* Pak, dia karena bentuk *software*, kecuali jasa yang tidak boleh, tapi kalau *right* dia mempunyai nilai karya intelektual dia masuk kedalam kebendaan yang tidak berwujud, *intangible* sehingga bisa di perjualbelikan. Nah ini *problemnya*.

**KETUA RAPAT:**

Bisa di perjualbelikan.



**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Bisa di perjualbelikan.

**KETUA RAPAT:**

Tapi seharusnya dipakai langsung oleh orang tersebut gitu ya?

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Betul.

**KETUA RAPAT:**

Nah yang sekarang ini justru menjadi *money game* itu.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Betul, disalah gunakan.

**KETUA RAPAT:**

Oke-oke saya paham.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Nah makanya perlu aturan yang tegas, sampai saat ini kan ada kekosongan hukum tidak ada aturan, sebetulnya robot ini seperti apa yang memang memenuhi standarisasi, tidak melakukan *over promise*, janji-janji yang muluk-muluk, bahwa dengan pakai robot tinggal tidur kita menghasilkan sejumlah keuntungan dan segala macam. Nah itu,

**KETUA RAPAT:**

Ya jual beli, tadinya itukan sistemnya sendiri yang harus diperjualbelikan, tapi ini jadi disentralisasi, bahkan katanya tadi itu sistem ini dimainkan, dipakai untuk memainkan *money game* itu.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

*Trading.*



*Trading* ini sebetulnya dengan menggunakan robot ada yang *real trading* ada yang tidak atau *fake trading*, yang tidak *real* kalau yang *real trading* dilempar ke pasar.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Ke *liquid provider*, ada *broker*, *liquid provider*, ada Undang-Undang Perbappebtinya ya, yang tidak *real trading* dia menggunakan cara-cara penipuan, misalkan.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya *fake* lah *fake* itu ya.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

*Fake* semuanya, dia bisa skim apa *margin call* secara mendadak dan segala macam hanya permainan. Nah itu yang kita akhirnya merugikan dunia kami industri MLM ini, karena jaringannya yang dipakai.

Terus kemudian yang kedua fenomena kami kalau diharapkan nanti terbentuk aturan *digital trading*, ini berkaitan dengan larangan kami ini Pak, di industri MLM ini untuk berjualan di *online marketplace*.

**KETUA RAPAT:**

Kenapa-kanapa?

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Jadi larangan bisnis MLM ini *direct selling* ini di *platform* digital, dilarang kita.

**KETUA RAPAT:**

Kenapa?



**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Alasannya bawah itu merupakan bisnis yang konvensional, karena kalau kita baca ini *bussiness classification* dia masuk ke dalam toko *online* itu termasuk konvensional toko.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Pimpinan izin.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Jadinya *retail*.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Pimpinan izin Pimpinan.

Saya kurang jelas terkait apa yang katanya bisa disetujui itu dalam apa, ketika ada perizinan tadi itu maksudnya gimana tuh? Yang katanya dalam namanya *right* benda itu gimana coba?

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Yang mana Pak?

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Yang robot.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI:**

Yang robot.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Ini kan ada ada Bapak sampaikan, yang tadi ditanya Pak Ketua tadi ini loh.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI:**

Ya ya.



**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Agak kurang jelas.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI:**

Di Undang-Undang Perdagangan, di Undang-Undang 7/2014 Juncto PP 29/2021, disebutkan apa yang dimaksud dengan barang, barang sebagai objek yang diperjualbelikan secara langsung dan tidak langsung. Barang diberi pengertian bahwa barang adalah benda yang berwujud, tidak berwujud dihabiskan, sama dengan bunyi Buku 2 Pak, KUH Perdata tentang *second recht*, Hukum Kebendaan. Jadi yang dianggap yang tidak berwujud kecuali jasa, jasa tidak boleh diperjualbelikan secara multi level.

**KETUA RAPAT:**

Jadi sistem pun, sistem pun itu termasuk benda gitu loh.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Betul, betul.

**KETUA RAPAT:**

Cuma sistem ini, sistem ini dipakai untuk permainan *money game* selanjutnya, bukan sistem ini yang diperjualbelikan gitu.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Betul, cuma penyalahgunaan sebenarnya sudah dilarang di Pasal 50 Pak di PP 29 sebetulnya, jadi tidak boleh namanya perdagangan dengan cara multi level yang berkaitan dengan produk bursa berjangka, sebetulnya, jadi kami harapkan juga.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Padahal yang bertentangan dengan.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Pasal 50 PP 29 ya sebetulnya, cuma memang.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Pernah nggak itu disampaikan misalnya, pernah nggak ada audiensi misalnya dengan Kementerian Perdagangan?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Belum.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Belum pernah.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Belum, baru ini.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Belum pernah Pak. Jadi kita harapkan ada aturan yang bagus, yang baik, sehingga industri kami ini tidak kebagian ininya lah, apa

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Jeleknya.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn);**

Jeleknya gitu, dari dulu kita selalu di *dompleng* sama orang-orang yang memang atau usaha-usaha yang memang berkaitan dengan skema ponzi itu.

**KETUA RAPAT:**

Ini menarik memang nih. Jadi mungkin saya sudah agak nangkap sedikit, terus Pak, lanjutkan kalau hal-hal yang berkaitan dengan ini lagi.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Mungkin sedikit sebelum ke.

**KETUA RAPAT:**

Ini ini menarik, memang kerugian masyarakat banyak nih, kalau bisa triliun lebih nih kalau.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Jadi sebenarnya kami hanya berpikir ada dualisme, kalau kami itu menganggap gini, disatu sisi ya, seperti apa diawal saya katakan bahwa kami sebagai pelaku bisnis



penjualan langsung, produk kami ini harus terdaftar dalam lampiran izin MLM kami. Semua perusahaan MLM ya MLM yang benar itu harus memiliki SIUPL dan barang yang kami jual itu harus terdapat, tercantum dalam lampiran izin kami. Nah, ada semuanya Pak, jadi semuanya harus tersebut. Nah yang untuk *robot trading* ini, ini dikeluarkan izinnya oleh teman-teman di Bina Usaha, Bagian Perdagangan.

**KETUA RAPAT:**

Karena itu benda.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Izinnya dikeluarkan Pak, jadi.

**KETUA RAPAT:**

Tapi kan waktu prakteknya yang dia mainkan gitu loh.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Nah itu, ketika kami melakukan *complain* ke teman-teman di apa di Bina Usaha, mereka bilang, ini produk sama seperti produk suplemen, produk kopi misalnya, *skin care*, artinya katakanlah ini produk suplemen pun akan menjadi bahaya kalau salah, salah salah guna, salah salah menggunakannya, mereka berfikir, kami mengeluarkan izin robot, sama halnya kami mengeluarkan izin pisau, pisau ini bisa dipakai buat memotong, bisa juga dipakai buat membunuh, ini analoginya mereka seperti itu gitu.

Nah kemudian setelah izin robot itu dikeluarkan, kami jualan, ketika kami jualan robotnya selesai, nah produk ini si robot ini dipergunakan untuk skema piramida, skema ponzi, buat penggalangan dana masyarakat. Nah ketika kami dituduh melakukan itu dipanggillah oleh teman-teman perdagangan yang lain, dalam hal ini PKPM dan Bappebti. Jadi kita ini bingung, kita di kasih ijin, kita jualan, kita dipanggil, kita mengerti posisi kami dipanggil oleh teman-teman Bappebti dan PKPM karena kasus-kasus itu gitu, cuma kan alangkah baiknya kalau memang dari teman-teman Bappebti mengeluarkan kriteria robot yang baik seperti apa, terus kami ini boleh jualan.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si)**

Izin Bu, sedikit saja.

Ketika izin dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan kaitan dengan robot tadi, itu mereka kasih batasan nggak? Bahwa robot yang, izin yang dikeluarkan ini batasannya abcd dan itu seperti itu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya, sampai, sampai saat ini mereka tidak ada batasan terkait robot ini, jadi.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Persoalannya disana Bu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya, jadi mereka hanya menganggap bahwa ini produk.

**KETUA RAPAT:**

Itu barang.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Ini barang. Jadi kalian silahkan jual, nanti *endingnya* ini produk mau dipakai seperti apa, itu itu beda lagi.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Nggak, kalau argumen dari Kementerian Perdagangan bahwa, inikan sama, kalau orang jual suplemen juga kalau disalahgunakan.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Atau jualan pisau disalahgunakan kan bisa jadi bahaya kan gitu loh, tapi pertanyaannya kalau dia memahami seperti itu, kenapa tidak dibatasi, bahwa kalau anda jualan apa jualan pisau, pisau ini tidak boleh digunakan abcd gitu loh.

**KETUA RAPAT:**

Ok, jadi begini.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Maksud saya seperti itu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya-iya paham.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin sama aduannya ini, maka ini kita dapat bahan, nanti kita bicarakan sama Bappebti.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Persoalan ini termasuk juga, nantikan kita juga ada Satgas Pangan, mungkin kita bisa selipkan juga, nanti waktu apa kita ada panja, kita banyak ketemu dengan perdagangan, karena kita lagi ada panja juga. Jadi disamping kita mengundang Bappebti, tanggal berapa kita undang Bappebti Bu. Iya silahkan.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Gini Bu, ini *real* saja ya, saya juga mendengar kan banyak korban akibat itu, dan inikan yang menjadi korban adalah masyarakat kita, notabene adalah rakyat Indonesia. Saya ingin punya gambaran sebetulnya dari Ibu-ibu sama Bapak-bapak di APLI, *realnya* regulasinya kayak apa? Bisa nggak Ibu kasih ke kami itu, sebetulnya baiknya kaitan dengan kebijakan ini tuh abcd gitu loh, sehingga ini dapat memproteksi nanti, terhadap masyarakat kita, agar tidak menjadi korban, terhadap tadi skema piramid atau robot tadi gitu loh, itu Bu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Bapak sudah terima ini belum? Ah oke disitu ada, ya itu dilampiran. Jadi udah oke, udah, jadi kan kita analisa ini sebenarnya sudah kurang lebih satu tahun, kemudian juga kami sudah audiensi dengan, kan di kalau kami ini industri kami diawasinya banyak Pak, polisinya banyak banget, ada Satgas Waspada Investasi itu melibatkan 14 Kementerian, kemudian ada lagi sekarang Satgas Robotik itu di Bareskrim, sekarang ada lagi namanya Satgas Nusantara, itu gabungan Bareskrim, PKTN dan Bappebti. Jadi kami itu merasa ini loh, kayak mereka tuh berburu di kebun binatang gitu loh, sedangkan di luar yang liar-liar banyak, kenapa harus kami yang diawasi, sedangkan kami itu selama ini disuruh bikin peraturan begini izin, kita bikin, izin ini, kita bikin, itu sebenarnya.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Mau tanya juga, ini dulu asosiasi ini cuma satu Bu ya?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.





**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

APLI?

Sejak kapan asosiasi ini menjadi 2?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

2 tahun yang lalu, eh 3 kurang lebih 3.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

3 tahun?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

3 tahun yang lalu?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si):**

Era siapa?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Nah waktunya.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Begini aja Bu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Sebelum sebelum Pak Luthfy.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Bu kalau sekarang, kalian



**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

3 tahun Ibu ya?

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Menjalankan ini *rule of the game*nya tuh batasannya itu apa saja deh, patokannya? Jadi yang Ibu bayangkan, oh kami tidak boleh seperti ini, kami boleh seperti ini, kemana Ibu ini.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Oh oke. Sebenarnya 2 garis besar yang yang kami bawa hari ini adalah apa masalah yang tadinya *digital marketing plus*. *Digital marketing* itu *include* dengan *marketplace* ya. Yang pertama adalah terkait robot *trading* itu, kami maunya kalau memang ya teman-teman Bina Usaha sudah mengizinkan robot itu dianggap sebagai suatu produk, karena kan dia juga sudah mengeluarkan ke beberapa perusahaan, itu bukan hanya di asosiasi kami saja, maksudnya ya tolong dikasih batasan robotnya itu boleh kalau memenuhi kriteria abcde, kurang lebih seperti, itu artinya, iya seperti yang tadi Bapak sampaikan, iya, iya betul. Jadi misalnya robotnya benar-benar *ditradingkan*, bisa *ditradingkan*, disemua *broker*. Jadi kan sekarang ini yang robot itu cuma bisa *ditradingkan* di *broker* tertentu, *brokernya* mereka yang atur, ini kan udah kelihatan permainannya disini gitu, tapi selama robot itu bisa dipergunakan diberbagai *broker*, harusnya sih kan itu berarti mereka memang melakukan *real trading* ya sepengamatan kami selama ini seperti itu.

Nah terakhir kami melakukan seminar gabungan Satgas Waspada Investasi dengan kami dengan APLI di Ritz Carlton, waktu itu yang buka Bapak Ketua MPR juga Pak Bambang, itu akhirnya semua pelaku *digital trading* datang, dan mereka *happy* dengan hasil yang saya lampirkan ke Bapak-bapak, ini hasil pada saat itu pertemuan, pada hasil seminar dengan teman-teman *digital trading*. Jadi memang merekapun mengharap ada aturan dari pemerintah, bahwa robot yang boleh itu poinnya abcd kurang lebih seperti sih.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E.) :**

Bu ada nggak acuan Bu ya buat masukan, negara mana misalnya gitu, sudah mempunyai regulasi yang baik terkait hal ini?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Silahkan.



## DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):

Jadi Pak izin saya menyampaikan.

Sebelum saya jelaskan yang Bapak. Jadi begini yang terjadi sekarang adalah sebenarnya waktu seminar APLI, itu Ketua Bappebti Pak Tirta sudah sampaikan, MLM kalau mau jual *software* aja silahkan-silahkan saja, ini mungkin tadi dikoreksi kalau saya salah, tapi nggak boleh ngurus yang namanya *broker*, atau lagi menerima uang masyarakat, nah ini yang paling sensitif. Jadi yang terjadi adalah sekarang yang tertangkap nih sudah dikasuskan adalah mereka juga menjual robot, kemudian mereka juga menerima uang masyarakat dan mengelola, itu *problemnya*.

Nah kembali lagi ke tadi maaf pertanyaannya apa Pak? Sorry. Oh untuk acuan negara, WFDS di Amerika sudah ada 2, 3 perusahaan yang menjual *software*, jadi menjual *software* nih sekarang sudah jaman digital ya Pak, itu udah umum dan mereka ada yang sampai ke perbankan dan lain-lain dan acuannya oke Pak, mereka tidak terjadi skema piramida dan skema ponzi. Jadi kita bisa mengambil *direct selling* yang dari negara Amerika itu salah satu standarnya ya sudah cukup bagus Pak, dan satu lagi disana ya kembali lagi Pak, skema ponzi, skema piramida, hukumannya seumur hidup Pak, ini yang perlu kita tingkatkan soal hukuman juga.

Dan kedua ini mengenai *marketplace* ya, ini saya agak sedikit *complain* kepada Kemendag yang sebenarnya kita, kita jual suplemen kemudian kita dilarang jual di *marketplace*, ya tentu saja kita ikuti, ~~tapi kemudian kita kan menjual ke anggota yang berlapis Pak, nah berlapis-lapis, nah ada kemudian yang masuk ke *marketplace*, yang kena siapa Pak, yang kena kita Pak. Jadi kita dipanggil, kita dimarah-marahin kita juga bingung gitu loh, kita gimana kelola, harusnya *marketplace* itu yang melarang gitu, lakukanlah *filter*. Nah ini kayaknya ada sedikit *in-balance*, jadi *marketplace* lebih lebih dibelain, saya mengerti ya, karena ini *Unicorn* Indonesia, tapi jangan lupa di kita ada 10 juta orang dan dengan *market* yang hampir 15 triliun pertahun, itu juga sebuah *market* yang besar gitu.~~

Nah kadang-kadang kita merasa ada *in-balance* apa ketidakseimbangan disini, peraturannya mungkin bisa dibikin lebih baik ya Bu ya Bu, Bu Sekjen atau pengurus. Nah itu yang kita pingin sampaikan, bahwa peraturan itu kalau bisa *marketplace* itu ketika yaitu yang ditegur *marketplacanya* jangan kita terus-terusan yang ditegur gitu, ya kita nggak bisa kontrol ya, kalau barang sudah dibeli kemudian dijual kembali itu memang agak susah dikontrol, itu saja dari saya.

## ANGGOTA BISNIS MLM KONVENSIONAL (TUPPERWARE)

Mohon izin Bapak Pimpinan saya menambahkan.

Saya dari Bisnis MLM konvensional Pak saya dari Tupperware. Nah seperti disampaikan oleh Pak Roys barusan, kalau kita lihat pemain-pemain robot itu dengan



keleluasaan yang saat ini, justru pemain-pemain konvensional yang dulunya betul-betul ada di *core* industri ini, sekarang mengalami kendala yang luar biasa Pak, sejak pertumbuhan teknologi digital dan *marketplace*. Karena dari peraturan yang ada, industri kami itu tidak boleh menjual di *e-commerce*, jadi contohnya Tupperware gitu ya, itu kami sebagai perusahaan tidak boleh menjual barang kami di *e-commerce*, karena kami terikat dengan aturan *direct selling* begitu. Jadi *direct selling* harus menjualnya kepada anggota, anggota kepada anggota lain dan sebagainya.

Nah tapi begitu ada masalah saat ini, misalnya ada anggota kami yang nakal gitu Pak ya, kemudian jual di *e-commerce*, itu yang ditegur kami sebagai perusahaannya, dan itu juga sebetulnya sangat menghambat perkembangan industri kami saat ini, karena dulu industri kami itu dianggapnya memiliki jaringan eksklusif, tapi sejak adanya *marketplace* ini, semuanya jadi dibuka Pak, sehingga nggak ada eksklusifitas lagi, justru sekarang kami ini sebagai pemain-pemain konvensional, sangat terhambat ruang geraknya dengan aturan ini begitu loh. Jadi pemain-pemain MLM itu tidak diperbolehkan menjual di *e-commerce* Pak, isunya seperti itu sekarang. Tapi anggota-anggota kami yang liar, itu berjualan di *e-commerce* tapi yang kena kami.

Nah kami memohon agar ada sarana, agar pemerintah itu bisa mengatur dengan baik gitu ya, bagaimana proses penegakan seperti itu, atau yang kedua biarkanlah kami yang mengatur anggota-anggota kami gitu loh, supaya kami diberikan ruang untuk bisa mengelola *e-commerce* itu gitu, kira-kira itu Pak, terima kasih Pak Ketua.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Yang mengendalikan *marketplace* itu siapa? Kan *marketplace* terbuka itu Pak semuanya.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Mungkin gambaran *marketplace* itu seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, itu *marketplace* kita nyebutnya *marketplace* tapi itu.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Maksud saya gini, yang bisa mengendalikan melarang *marketplace* untuk menjual yang seperti itu, siapa.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Mereka sendiri.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Ya nggak bisa dong kalau gitu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Jadi waktu itu kami sudah ada beberapa pertemuan, mereka juga punya asosiasi namanya IDEA, nah IDEA itu kita udah sepakat bahwa anggota IDEA itu tidak akan, tidak boleh menjual produk apa dari produk *marketing* dari *direct selling*, tapi alasan mereka, mereka nggak punya *filter*, mereka nggak punya *filter* untuk tahu apakah produk itu produk *direct selling* atau bukan.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Yang mengawasi, yang mengawasi *marketplace* kan mestinya Pemerintah.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Yang mengawasi *marketplace* ya itu tadi Pak, teman-teman di Bina Usaha.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Ambil contoh misalnya, ambil contoh saya, waktu pas, izin Ketua. Pada saat kita kumpul sama Asosiasi Kosmetik waktu itu, kosmetik ilegal aja susah juga dikontrol di *marketplace*, apalagi ini begitu loh, maksud saya begitu.

Jadi siapa yang bisa mengontrol, karena puluhan ribu produk, ini kan sebenarnya kan *willingness* nya si *marketplaceny* aja.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Sebenarnya, tapi yang bisa melarang tuh siapa, kalau *marketplace* 1 yang misalnya yang apa namanya, yang *Unicorn* gitu, *okay* lah yang *Unicorn* masih bisa di kontrol, tapi kan *marketplace* itu banyak, itu tiba-tiba ada yang bikin lagi baru, nah itu gimana tuh kontrolnya itu Pak?

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn):**

Izin Pak Ketua untuk menjelaskan.

Jadi intinya memang ini berkaitan dengan revolusi industri yang 5 point 0 yang sekarang sudah menjelang ke 5 titik 0 ya, jadi artinya kita serba digital, kita ini industri *Multi Level Marketing* ini dalam PP 29 itu ada larangan, untuk kemudian menjual di *online marketplace*. Jadi kalau menurut saya itu sudah tidak selaras lagi, andaikata pun memang ini kan terkait dengan *save harbor policy* ya, jadi artinya mereka memang



dilindungi si *marketplace-marketplace* ini untuk tidak tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diperjual, kecuali hal-hal tertentu yang sudah jelas bahwa itu pelanggaran hukum kayak pornografi dan segala macam, tapi terkait dengan produk memang sulit untuk mereka untuk menyeleksi satu persatu, karena sangat banyak produknya.

Cuma prinsipnya disini kami ingin agar ada ruang atau ada aturan bahwa tidak hanya yang konvensional tapi yang *direct selling* pun dimungkinkan untuk berjualan secara digital, paling tidak nanti walaupun memang ada yang *cutting press* di *marketplace* segala macam yang merugikan perusahaan kami, itu kita bisa akan menjadi apa memiliki toko juga secara eksklusif juga, tetap distribusinya tetap eksklusif, jadi tidak menghilangkan prinsip multi levelnya, cuma kita diijinkan untuk berjualan secara digital, sehingga mereka yang mau *cutting press* segala macam situ nggak mungkin mau, si apa si konsumennya, jadi akan membeli ke toko yang resmi, cuma dalam *platform digital* gitu. Ya sekarang ini kan tidak dimungkinkan, sehingga kita hanya dimarah-marahin oleh Kemendag aja gitu, padahal pelakunya adalah member-member kami atau mitra usaha kami yang tidak bertanggung jawab, sehingga itu menimbulkan *in-equal*.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang member-membarnya yang banyak jualan tuh member-membarnya yang banyak jualan di ini ya.

**KEPALA DIVISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN APLI (DR. UUS MULYAHARJA SH., SE., MH., MKn):**

Betul. Dia jatuhkan harga, untuk kemudian dia mencapai satu tujuan tertentu begitu.

**KETUA RAPAT:**

Atau begini deh, untuk mempercepat waktu ya, mungkin nanti apa yang menjadi usulan, karena kami sengaja mengundang Bappebti gara-gara ini, gara-gara mau pertemuan hari ini, saya sih kami undang tanggal 24, itu Bappebti untuk apa hasil dari sini, kita mau sampaikan. Nah itu mungkin disusun saja nanti, apa-apa yang diinginkan, apa tentunya dalam bingkai kita bernegara, berbangsa Indonesia ya, jadi apa aturan-aturan yang.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Melindungi konsumen dan produsen Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Melindungi konsumen dan produsen iya, itu tolong beri tahu kami, kami agak paham, sudah mulai paham, tadinya kami bingung terus terang, kami bingung apa sih ini, APLI ini apa sih. Tadi juga sempet teman-teman tanya apa sih APLI itu.





**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS) :**

Bahasanya anak Jaksel gitu.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tolong dikasih tahu kami dan apa yang menjadi keluhan, termasuk nanti apa anda mau berjualan di *marketplace* dan sebagainya, tolong diuraikan dalam satu, jangan panjang-panjang juga gitu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Kalau soal panjang memanjang itu orang-orang DPR nih jagoanlah soal itu. Mau panjang mau pendek gitu jagoanlah, tapi yang inti-intinya sama saja, nanti di beritahu kami, sehingga pada waktu rapat dengan mereka hal yang terkait akan bisa kami lakukan.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Besok bisa kita kami siapkan sih Pak, sebenarnya sudah ada gitu, tapi kan etikanya besok aja.

**KETUA RAPAT:**

Yang jelas nanti tanggal 24 rencana kami dengan Bappebti.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ichsan Firdaus, minta kita untuk rapat terus nanti, dan saya punya penguasa Aceh ini Pak Muslim baru di Komisi VI ini pindahan, yang berkuasa penuh dan sewenang-wenang nih di Aceh. Gitu ya, ada lagi yang lain mungkin?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Intinya sih cuma 2 poin itu saja sih Pak, ini kita sampai kita garis bawah kan, poin pertama itu terkait dengan *digital trading* tadi, kami minta adanya adanya peraturan terkait

*digital trading* ya atau robot *trading* yang diizinkan atau digunakan, kemudian terkait dengan PP 29 Pasal 51 tadi, kalau kami memang terhalang PP 29 itu solusinya bagaimana.

**KETUA RAPAT:**

PP 29 Pasal 51.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Pasal 51 Huruf O.

**KETUA RAPAT:**

Huruf O, yang terhalang di *marketplace* itu ya.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Yang akhirnya banyak *member-member* itu yang mau jualan disitu.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F.P-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Tambahan Ketua boleh?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Jadi memang itu kita bekutat di PP 29 pasal 51 huruf J, huruf O, itu aja sih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Karena disitu ada *digital trading* dengan *marketplace*.



**KETUA RAPAT:**

Oke.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Pengen tahu itu aja sih, kami tuh jangan disalahin terus gitu, kita udah ikuti aturan yang salah siapa, yang dipanggil siapa gitu sih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Oke.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Udah ada yang ditutup belum?

**KETUA RAPAT:**

Apa? Udah tutup banyak.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Banyak yang udah tutup.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan Pak Muslim.

**F.P-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tambahkan ya Bu ya, kalau kita, saya lihat disini dari 106 perusahaan penjualan langsung ya, ini kalau kita lihat kontribusi buat negara kan luar biasa ya, segini hampir 16,3 triliun.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Itu tahun 2019 Pak.

**F-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Ya artinya tahun 19, berarti kan sekarang terus berkembang.



**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Udah lebih ya.

**F-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Saya paham yang disampaikan Ibu-ibu Bapak-bapak tadi, ini kan kita ingin cari solusi.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**F-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Kenapa, karena kalau kita biarkan ini terus kan yang korban kan masyarakat.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Betul.

**F-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Bahkan hari ini sampai masyarakat bawah jadi korban ya?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Betul.

**F-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Saya pikir ini harus dihentikan.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Betul.

**ANGGOTA KOMISI VI :**

Sudah jadi korbannya Pak?

**F-DEMOKRAT (MUSLIM, S.H.I.,M.M):**

Saya belum, mudah-mudahan nggak lah. Tapi sudah banyak juga yang nawarin sebenarnya, apalagi kripto yang baru-baru ini menarik benerkan, awal awalnya untung, tapi terakhir rugi semua saya lihatkan.



Tapi saya sepakat yang disampaikan Pak Ketua tadi, disamping yang Ibu sampaikan disini saya yakin ada pointer-pointer khusus yang kira-kira bisa *membackup*, karena tentu DPR ni kan kita ingin tetap berpihak kepada masyarakat, dan juga kepada pengusaha, jangan sampai pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan, tapi yang merugikan masyarakat. Silahkan aja Ibu nanti yang disampaikan Pak Ketua saya sepakat tadi, dari *pointer-pointer* penting, jadi sehingga pada saat kita pertemuan dengan Bappebti kita sudah *clear*, jadi sehingga APLI ini tidak jadi terus sasaran Kemendag, saya pikir sepakat.

Itu Pak Ketua terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

*Clear* ya, semua temen *clear* ya. Jadi memang ini banyak robot ini banyak yang menjadi ini apa, *trending topik* didunia keuangan lah ini sama.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Cuma, cuma kalau kriptokan, kripto itu bukan *money game*, tapi kripto tuh adalah *supply and demand* aja.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya iya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau *supply*nya banyak gitukan jadi turun kalau gitu ya, *supply and demand* yang saya lihat itu. Kalau di Bali itu ada MS Glow itu anggota APLI ya?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Lagi proses Pak, lagi proses.

**KETUA RAPAT:**

Kalau itukan barang kan Bu?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Dia *Skin Care*.



**KETUA RAPAT:**

Ya artinya barang kan?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Barang, cuma sekarang tuh udah mulai nakal juga, karena *indent* dia, jadi orang suruh bayar dulu produknya nanti, itukan nggak boleh begitu, kalau kita jualan ya ada produk lah.

**KETUA RAPAT:**

Oh gitu ya. Yang di, yang di virtual, ada yang mau bicara?

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Ijin Pimpinan, Abdul Hakim.

**KETUA RAPAT:**

Ada Pak Hakim.

---

**ANGGOTA KOMISI VI :**

Nggak ini Pak Hakim kenapa virtual terus?

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Iya Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI VI :**

Udah berapa kali virtual terus ini.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Omicron Pimpinan, Omicron.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Iya Pimpinan terima kasih.

Selamat siang.





*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI, hadir secara fisik maupun secara virtual.**

**Yang saya hormati teman-teman dari Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia dan juga selamat datang Bang Mulsim di Komisi VI, salah satu penguasa Aceh ini.**

Berkaitan dengan robot *trading* tadi itu, kiranya mungkin bisa diberikan penjelasan apa yang lebih rinci Bapak Ibu, karena saya sempat ada bahasan terkait robot *trading*, itu kalau nggak salah entah bener atau enggak, katanya memang kalau bisa itu nanti *trading*nya diusahakan menggunakan *broker* lokal, satu itu.

Kemudian yang kedua, sempat ramai juga robot *trading* itu isunya setelah rapat dengan Kementerian Perdagangan 31 Januari kemarin, saya menyoroti soal Binary Option, akhirnya robot *trading* juga ikut disorot dan juga sempat ramai. Nah kenapa seperti itu, karena banyak teman-teman itu yang belum bisa memastikan sebenarnya dana yang masuk itu memang digunakan untuk *trading* di *platform* itu, atau, atau bagaimana, karena inikan kalau kita melihat regulasinya juga masih belum, belum, belum bisa *clear* 100%, nah makanya itu mumpung besok Bapak Ibu dari APLI, karena Komisi VI akan rapat dengan Bappebti, nah gambaran-gambaran seperti itu bisa menjadi *feeding* untuk kita, dan ketika nanti komunikasi dengan Bappebti apa-apa saja yang perlu didorong, regulasi mana yang perlu diperjelas, itu bisa kita sama-sama sinergikan. Karena memang kalau kita berbicara perkembangan jaman saat ini, tentu pola bisnis banyak berubah, dan tadi itu sempat kejadian Bapak Ibu yang terkait apa namanya MLM, kemudian jualan lewat *online*, kemudian memberinya kena tegur dan dipecat, karena kebetulan sahabat saya di Kediri ada yang pernah mengalami seperti itu juga, tapi ya serba repot, satu sisi kalau nggak ikut masuk ke pasar digital ketinggalan, tapi kalau masuk pasar digital yang kena tegur perusahaannya. Nah berkaitan dengan opsi-opsi ini tentunya perlu didiskusikan, perlu dicari jalan tengahnya bersama.

Saya kira 2 poin itu Pimpinan, terima kasih atas waktunya.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*

Selamat datang kembali Bapak Martin, sarjana Covid akhirnya, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Namanya gantian, gantian kenanya. Itu Hakim, ada lagi yang dari ini, cukup ya. Saya rasa cukup. Ibu mau ada tambahan jawaban atau mau.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):**

Satu lagi dong Pimpinan.



**DEWAN PEMBINA APLI (ROYS TANANI):**

Ijin saya Pak Pimpinan, saya menjelaskan yang tadi ditanyakan.

Jadi begini *problemnya* memang ini, *problemnya* adalah sebenarnya awalnya adalah karena Pasar Forex di Indonesia, itu tidak, jadi ini lebih teknikal ya, jadi pasar Forex di Indonesia nih ada ketinggalan dibanding luar negeri. Jadi salah satunya adalah tidak di peraturan masih tidak mengizinkan, Bappebti tidak mengizinkan 0,01 Pak untuk *mini lot, micro lot*. Jadi dari sanalah kemudian pemain skema ponzi ini melihat peluang *market*-nya, jadi mereka menggunakan *broker* luar yang boleh 0,01 lot, jadi kalau dulu mainnya tuh minimal 100. 10.000 US atau 100 sekian juta, nah dengan tiba-tiba ini bisa menjadi 1.000 dolar. Jadi 14 jutanya, nah *market* itu langsung turun Pak, langsung turun ke menengah, dan menengah ke bawah, disinilah itu habis semua, kenapa, karena ternyata yang salah satu kasus yang sudah sudah di Bareskrim dan sudah kelihatan termasuk rekaman pembicaraan, mereka tidak ada *trading* Pak, jadi uang masuk bagi-bagi, beli mobil, beli apa, beli pulau, beli ini beli itu, jalan-jalan, foya-foya habis semua.

Jadi ketika apa beda skema ponzi dengan skema piramida dengan MLM benaran, MLM benaran kami jual produk Pak, mau ada anggota nggak ada anggota nggak masalah, skema ponzi nggak ada *member* masuk, skema piramida gak ada *member* masuk mati Pak, nah sekarang terjadi adalah ketika 30 Desember itu Kemendag menghentikan sebagian karena awalnya Binomo itu. Nah ketika dia menghentikan memeriksa, itu *member* yang masuk, *flow* aliran dana habis, nah mereka mulai panik akhirnya ada yang menghentikan bisnis, ada yang kabur, ada yang pura-pura *trading* akhirnya habis uangny semua.

Jadi intinya apa, intinya skema ponzi ini kalau kita ingat dulu di Medan itu ada BMA, BMA itu korbannya banyak ibu-ibu, Ibu-ibu pasar semua, kemudian naik lagi saya ingat banget ada bebek yang apa QSR yang perternakan bebek, kemudian perternakan apa, nah emas yang sempat melibatkan salah satu anggota MPR Pak Haji Din, yang kemudian sebenarnya dia dicelakai, Pak Haji Din itu dicelakain Pak, jadi dia PT. GSIT kalau nggak salah, dia dicelakain dengan cara diajak masuk sebagai komisaris dan beliau nggak tahu apa-apa, kebetulan saya kenal beliau, akhirnya beliau jadi, si pelaku kabur ke luar negeri, Pak Haji Din nya masuk penjara, kasihan sekali. Jadi banyak sekali korban awalnya berasal dari memang kasus ke kesempatan dalam kesempatan ini.

Jadi pertama memang skema ponzi ini perlu dihukum seberat-beratnya, skema piramida, kaya Bernie Murdoch itu dihukum 120 tahun atau 200 tahun Pak, yang dari Amerika tuh, dan dia skema ponzi piramida ini nggak kayak dulu, katakan setahun dua tahun meledak, ini bisa 20 tahun Pak, mereka bisa dengan cantik membungkusnya itu, iya hampir kalau tidak salah 500 miliar US dollar, dan itu kenanya sampai ke artis-artis semua ya.

Nah kita tahu itu baru kejadian kalau nggak salah satu apa artis atau model majalah populer yang lompat ya, nah itu karena skema ponzi yang terjadi ini, iya iya, jadi





banyak sekali kita nggak tahu kejadian bunuh diri, depresi, dan lain-lain orang yang menjual rumah nah. Nah ini sebenarnya sudah diatur oleh Bappebti mengenai *broker* ini, mengenai *broker* bahwa uang tidak boleh diterima kita, uang itu harus terima, kedua tidak boleh mempromosikan keuntungan daripada *trading* ini, nah awal semua ini karena memang ya itu ada celah peraturan yang dilihat oleh pelaku skema ponzi dan piramida itu.

Terima kasih.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Izin Pimpinan, Pimpinan, ijin Pimpinan Abdul Hakim.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Pak saya makasih Pak, sudah di-*highlight* juga berkaitan-berkaitan dengan ponzi dan kawan-kawan tadi, sebenarnya betul Pak, ini itu sudah terjadi lama dan khususnya di daerah-daerah, skema-skema seperti ini tuh bentuknya bisa koperasi dan kawan-kawannya lah, intinya gimana caranya *diiming-iming* dengan keuntungan yang gak masuk akal, narik duit orang dan lain lain sebagainya dan kita juga, juga sama-sama tahu sebenarnya kan yang berhak mengumpulkan dana masyarakat itu hanya perbankan dan koperasi, koperasi itu pun hanya anggotanya saja.

Nah dengan perkembangan saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya jujur Pak, dari saya pribadi saya nggak yakin Kementerian Perdagangan khususnya Bappebti ya kan itu memahami mekanisme sampai dengan sedetail itu, ngurus minyak goreng aja nggak beres-beres kok, apalagi mengurus hal-hal yang seperti ini Pak.

Jadi dalam forum yang, forum sore ini mungkin bisa juga Pak ditambahkan, kira-kira gimana sih Pak mekanisme proteksinya, karena kan *jenengan-jenengan* semua disini yang di APLI itu kan sudah memahami betul kondisi-kondisi *realnya* dilapangannya seperti apa, nah nantinya masukan berkaitan dengan mekanisme proteksi itu disampaikan saja Pak ke Komisi VI. Jadi ketika kita menyampaikan dan mendorong Bappebti itu memang benar-benar tahu lebih lebih teknisnya, karena tadi disampaikan juga ada peraturannya tapi tidak bisa dijalankan, adapun peraturan dilanggar, mungkin jangan-jangan ada oknum yang bermain disitu juga.

Nah dari forum-forum RDPU seperti ini, inikan Komisi VI dapat *feeding*, dapat masukan baru, nah nanti lebih detail lagi disampaikan kira-kira mekanisme proteksi seperti apa, jadi skema-skema ponzi dan *tetek bengek* lain-lain itu bisa kita apa, bisa kita sikat bareng-bareng lah, biar yang benar-benar bisnis dengan skema MLM, kemudian



dengan skema-skema yang seharusnya berjalan dengan lancar itu enggak jadi kambing hitam atau enggak dapat stigma negatif seperti itu Pak, terima kasih.

Ternyata disitu ada kawan saya Mas Raihan, dari Arminareka kalau nggak salah, *matur suwun*. Tadi baru dikabarin di WA.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Ya udah datang fisik aja dulu, datang fisik aja.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Mas Raihan, Hakimnya ini sombong katanya.

Izin Ketua, saya hanya berharap begini, bahwa ada usulan tertulis dari teman-teman apa apa APLI ini, terkait dengan bagaimana agar ekosistem bisnis ini, ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan masalah hukumlah, masalah penipuanlah, dan sebagainya gitu. Artinya kita perlu ada satu *pointers-pointers* tertentu terkait dengan regulasi yang mau diminta, sehingga kemudian enak kita kerjanya gitu loh, jangan sampai ditangkap-tangkepin terus, kemudian Pak Daeng kalau jadi *crazy rich* nanti ditahan lagi begitu, artinya *crazy rich* betul-betul *real rich* gituloh, ya Pak Martin tinggal menempati saja.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Sebelahnya Bang Ican, itu real kalau itu Pak.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Oh iya betul, Pak Martin kan, Pak Martin kan?

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri.

**F-PGOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Oh sebelah kiri. Ya intinya adalah harus ada tertulisnya sehingga kemudian sejujurnya nih, kami tidak terlalu memahami terlalu dalam terkait dengan hal ini, tapi kami, kalau Pak Doni berminat mendalami ini sebenarnya, kalau saya tidak tidak berminat mendalami, tapi menikmati saja kalau saya, begitu, begitu Pak Ketua.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Ini saya mau tanya sedikit informatif. Waktu dulu apa yang Dream 4 Fun itu apa. Si Fili Mutaqien kalau nggak salah ya, ketika dia kena itu sudah ada regulasi mengatur atau karena penipuannya, atau karena apa ya dia itu? Kenanya?



**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Waktu itu sudah ada Undang-Undang 7/2014 sudah ada, tapi waktu itu pasal yang disangkakan masih 372, 378, masih penipuan.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Masih penipuan artinya?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Makanya hukumannya sebentar.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Ya makanya kenanya bukan karena terkait *trading* yang dia lakukan, tapi karena penipuannya?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Bukan karena usaha yang dijalankan apa skemanya?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Ya.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Tapi karena penipuannya kan?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Ya harusnya skemanya kena juga, tapi saya juga nggak ngerti kenapa akhirnya cuma 372, 378 yang kena.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Pada waktu itu mungkin regulasi terkait itu belum ada?

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Sudah ada.

**F-PGOLKAR (DONI AKBAR, S.E):**

Sudah ada, ok.

**F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):**

Ijin saya ingin menambahkan.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):**

Izin bertanya Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Sebentar mau ditambahkan dulu?

**F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):**

Iya sedikit.

Saya ingin bertanya Pimpinan, ini kepada apa namanya mitra kita, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab melakukan pencerahan atau namanya edukasi kepada masyarakat nih soal apa namanya bisnis seperti ini. Gimana sih mereka bisa menentukan mana yang robot *trading real* dengan *money game* dan seterusnya itu siapa sih yang punya tanggung jawab sebenarnya. Apakah hanya Bappebti dan Kemendag atau orang-orang pelaku, lalu asosiasi seperti ini juga ikut bertanggung jawab, itu yang pertama.

Yang kedua, saya dengar tadinya semua yang terkait robot *trading* juga di stop, tapi belakangan saya dengar sudah ada yang keluar, di Bappebti misalnya seperti robot Extabit misalnya, sudah dapat izin SPL, juga robot *trading* RBIT saya dengar mau keluar, nih seperti apa sih sebenarnya? Tolong kita diberikan sedikit informasi Pak, terima kasih.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Eh iya.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):**

Saya nambah sedikit boleh Pimpinan? Izin, Husein, Husein.





**KETUA RAPAT:**

Oh Husein, ya diatas, diatas, diatas, dilangit, dilangit.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):**

**Terima kasih Pimpinan teman-teman Komisi VI yang saya hormati,  
Sekjen APLI dan teman-teman dari APLI.**

Cuma ingin menambahkan saja, mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari APLI. Pada intinya kok saya merasanya yang dipaparkan oleh APLI ini semuanya ini diberatkan kepada pengawasan dari Kemendag, nah khususnya dari Bappebti dan juga turunannya gitu. Jadi yang saya tahu juga kan saya mengikuti karena hal ini kan sangat cukup bersamaan dengan adanya *trend* atau *hype*-nya dari *cryptocurrency* yang dimulai mungkin kurang lebih 2 3 tahun ya di Indonesia ini, bahwa hal-hal seperti itu, hal-hal digital seperti itu juga mulai berkembang termasuk robot ini.

Nah tadi kalau disebutkan bahwa ada produk yang dijual awalnya bungkusannya yaitu dengan menjual *software* apa namanya analitik atau robot ya, nah itu sebetulnya gunanya untuk membantu para *trader* untuk mempermudah mereka pada saat mereka melakukan *trading*, nah kalau aplikasinya itu sebetulnya sah-sah saja, namun tadi disebutkan yang tidak sah itu adalah penarikan uang dari masyarakat ya. Nah itu kalau misalkan pakai *software* itu, jadi saya jadi agak ada pertanyaan, kalau pakai *software* itu sejauhmana sebetulnya itu bisa membantu itu membantu para *trader itu*, tapi diluar dari itu saya juga melihat adanya keterlambatan ataupun kurangnya pengawasan tadi disebutkan Pak Deddy, siapa yang bertanggung jawab dalam hal edukasi terhadap masyarakat mengenai hal digital seperti ini, apakah tadi asosiasi juga atau dari kemendag juga, karena ternyata yang ada yang sudah 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, baru sekarang semua kena, yang sekarang juga baru-baru kena itu ternyata ada yang 2 tahun, itu baru kena, dan ada yang baru 3 bulan 4 bulan beroperasi mereka kena semua pada saat waktu yang bersamaan.

Ini kan menjadi pertanyaan sebetulnya bagi kita, bahwa robot *trading* dan Binomo itu 2 hal yang berbeda, kalau tadi Pak Hakim mengatakan banyak Binary Option dan robot *trading* itu, sebetulnya skemanya dua-duanya berbeda, cuma kenanya itu bersamaan gitu, inikan jadi pertanyaan sebetulnya Ketua, mungkin nanti kita bisa tanyakan pada saat kita rapat dengan Bappebti ya, ini kan juga Bappebti ya kurang lebih. Jadi ini pertanyaan gitu, ini aneh gitu sebetulnya, ini waktunya bersamaan, tetapi disatu sisi ada perusahaan robot *trading* yang Bergeraknya sudah jauh lebih lama sekitar 2 tahun mereka fortofolionya di CV-nya mereka sudah 2 tahun, bahkan sudah sedemikian lama, ada juga yang baru, tapi kenanya baru sekarang gitu. Jadi ini apa sih sebetulnya, apakah apanya gitu, jadi aneh gitu kita berfikir, karena masyarakat juga tadi dikatakan oleh teman-teman APLI mereka meng*claim*, bahwa mereka mendapatkan perizinan dari apakah ada SIUP SIUP, apa tadi Pak Deddy mengatakan.



**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

SIUPL.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):**

SIUPL dan juga ada izin dari dari AP2LI dan segala macam, inikan masyarakat jadi merasa jadi merasa oh yakin percaya ini tuh *legit* gitu, karena ada *tradingnya*, kan ada aplikasinya kalau tidak salah.

Nah itu kurang lebih seperti itu Pimpinan, jadi kita berharap mungkin ini bisa dibawa nanti pada saat kita rapat dengan Bappebti, karena ini penting sekali, jangan sampai gini terus, mungkin ada orang yang sudah tahu, ini ponzi sebetulnya cuma *cyclenya* Ponzi itu kurang lebih bertahan satu setengah sampai dua tahun biasanya dia akan runtuh. Nah ataupun juga orang berfikir, oke saya masuk selama 6 bulan, itu mungkin bagi orang-orang yang sudah apa, sudah melakukan *research* yang lebih dalam tapi tetap ikut ada juga kayak begitu, tapi ada juga yang memang *purely* mereka *teriming-imingi* katakanlah seperti itu.

Mungkin itu saja Pimpinan tambahan dari saya terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya rasa cukup ya, cuma memang berubah *mindset* saya berubah Pak, tadinya saya pikir yang ponzi, piramida, itu sama juga dengan MLM ini begitu lho.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Nggak Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya itu otak saya tadinya Pak, karena itukan semua adalah sama aja gitu antara orang ke orang gitu loh, kan antar orang ke orang berturunan begitukan, itu jadi otak saya itu jadinya kan. Jadi hampir seolah-olah sama ya, karena menyangkut keterkaitan orang ke orang gitu loh, itu jadi disitu. Saya rasa cukup ya, Bu Dewi cukup ya? Cukup, oke.

Kalau begitu saya masih menunggu nanti kajian dari Ibu dan Bapak-bapak sekalian, sehingga nanti dalam rapat nanti kita kami diskusikan, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi kebijakan yang berpihak tentunya kepada negara kita dan kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu Rapat RDPU dengan Asosiasi Pedagang Langsung.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Penjualan langsung.



**KETUA RAPAT:**

Penjualan langsung.

**SEKJEN APLI (INA H. RAHMAN):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI dengan ini, dengan mengucapkan,  
*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, Salam om Shanti Shanti om  
Saya tutup. Terima kasih Ibu Bapak.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.58 WIB)**

Jakarta, 22 Maret 2022

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



Dewi Resmi, S.E., M.Si.  
NIP. 197104071992032001

